



PENETAPAN

Nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Mustakim bin Jamaludin, Ttl: Ntoke, 01-07-1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, Nik: 5206070107711174 tanggal 14-05-2018, tempat kediaman di RT.007 RW.004 Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 03 Juli 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 326/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: **Liantin binti Mustakim**, Ttl, Ntoke, 01-07-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.007 RW.004 Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Saiful bin**

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



A. Rafik, Ttl: Bima, 15-07-2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Lingkungan Lela RT.003 RW.002 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak Pemohon yang bernama **Liantin binti Mustakim** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 20 minggu;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Nomor: 120/KUA.19.06.19/Pw.01/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Liantin binti Mustakim**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Saiful bin A. Rafik**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a.kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.belum siapnya organ reproduksi anak;
- d.dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e.potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap keponakan Pemohon yang hendak menikah dengan calon suami tersebut;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa anak Pemohon/calon isteri bernama **Liantin binti Mustakim**, Ttl, Ntoke, 01-07-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.007 RW.004 Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon suami tersebut bahkan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 20 minggu;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami bernama **Saiful bin A. Rafik**, Ttl: Bima, 15-07-2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Lingkungan Lela RT.003 RW.002 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon isteri tersebut;
- Bahwa ia telah berhubungan dengan calon isteri tersebut terlalu dekat bahkan telah melakukan hubungan badan dan calon isteri tersebut telah hamil 20 minggu;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan calon isteri tersebut dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan calon isteri tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa Bapak kandung calon suami bernama A. Rafik bin Ismail bertempat tinggal di Lingkungan Lela RT.003 RW.002 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua calon suami telah memberikan peringatan-peringatan agar calon suami tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon isteri tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan bahkan calon isteri tersebut telah mengalami kehamilan berjalan 20 minggu akibat telah berhubungan badan dengan calon suami tersebut;

- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap bertanggung jawab dan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5206070107711174 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 5206071407100002 tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama calon isteri Nomor Induk Siswa Nasional 0047025310 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 5272-LT-27082019-0037 tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat model N-9 perihal Penolakan Pernikahan nomor 120/KUA.19.06.19/Pw.01/VII/2020 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/783/01.2.5/2020 tanggal 02 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Wera Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. Ruslan bin Arsyad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di RT. 003, RW. 002, Desa Jatibaru Barat Kecamatan Askota, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon isteri dan calon suami karena saksi sebagai paman dari calon suami;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena calon isteri tersebut kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami di tolak oleh KUA Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa calon isteri tersebut telah di lamar calon suami tersebut dan telah diterima secara baik oleh keluarga Pemohon ;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon isteri telah hamil 20 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

2. Arban bin Umar, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT. 005, RW. 003, Desa Ntoke Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon isteri dan calon suami karena saksi sebagai paman dari calon isteri;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena calon isteri tersebut kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Wera Kabupaten Bima;
- Bahwa calon isteri tersebut telah di lamar oleh calon suami tersebut dan telah diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon isteri tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon isteri Pemohon telah hamil 20 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami tersebut;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon, calon isteri, calon suami dan orang tua calon suami sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri dan calon suami tersebut pada pokoknya bahwa calon isteri telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil 20 minggu, ia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa paksaan dari orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya bahwa ia telah berpacaran dengan calon Isteri tersebut, bahkan telah berhubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon tersebut hamil

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



20 minggu dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan calon isteri tersebut tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon suami tersebut yang pada pokoknya bahwa selaku orang tua calon suami siap bertanggungjawab dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon (calon isteri) dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dan keterangan calon isteri yang diperkuat dengan bukti P.3 telah terbukti calon isteri tersebut lahir tanggal 01 Juli 2002, sehingga baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 calon suami tersebut lahir 15 Juli 2001, yang berarti telah berumur 19 tahun, sehingga secara hukum telah melewati batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.5 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon/calon isteri dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.6 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi positif hamil lebih kurang 20 minggu;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah karena anak pemohon tersebut telah hamil akibat berhubungan dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan calon isteri, calon suami dan para saksi bahwa calon isteri

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan telah melakukan hubungan badan sehingga saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 20 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon isteri dan calon suami tersebut dan orang tua calon suami tersebut serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon tersebut dengan calon suami tersebut sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat, telah berhubungan badan dan anak Pemohon telah hamil serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan calon isteri tersebut telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Liantin binti Mustakim untuk menikah dengan calon suaminya bernama Saiful bin A. Rafik;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 *Miladiayah*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1441 *Hijriah*, oleh Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Hakim

ttd

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Nurkhairiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 306.000,00
Tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan ini sama bunyi dengan aslinya,

Pengadilan Agama Bima,

Panitera,

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm



Drs.H.Musaddad, SH.

Hlm. 15 dari 14 hlm. Pen. No. 326/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)